

PENGARUH PERENCANAAN KEUANGAN DESA, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN DETUSOKO

Apolonia Afliana Baka¹, Maxion Sumtaky², Saman³

^{1,2,3}Universitas Merdeka Malang

Email : aplinbaka@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Village Financial Planning, Accountability, and Transparency on Village Government Performance in Detusoko District, both partially and simultaneously. This research employs a quantitative approach with a causal associative research design. The population of this study consists of all village government officials in Detusoko District, totaling 126 individuals. The sampling technique used was purposive sampling, resulting in a sample of 63 respondents. Data were collected through questionnaires designed using a Likert scale. The data were analyzed using descriptive statistics and multiple linear regression analysis with the assistance of SPSS software. The analysis included instrument testing (validity and reliability tests), classical assumption tests (normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation), and hypothesis testing using t-tests and F-tests. The results indicate that Village Financial Planning, Accountability, and Transparency simultaneously have a significant effect on Village Government Performance, with an F-test significance value of 0.000. Partially, Village Financial Planning and Accountability do not have a significant effect on village government performance, while Transparency has a positive and significant effect and is identified as the most dominant variable. The Adjusted R Square value of 0.852 indicates that 85.2% of the variation in village government performance can be explained by the independent variables in this study. This study concludes that transparency is a key factor in improving village government performance in Detusoko District. Therefore, village governments are expected to enhance public information disclosure as an effort to improve performance and strengthen public trust.

Keywords: Village Financial Planning, Accountability, Transparency, Village Government Performance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Perencanaan Keuangan Desa, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Detusoko, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintah desa di Kecamatan Detusoko yang berjumlah 126 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 63 responden. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang disusun menggunakan skala Likert. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Pengujian meliputi uji instrumen (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), serta uji hipotesis melalui uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Perencanaan Keuangan Desa, Akuntabilitas, dan Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Desa, dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,000. Secara parsial, Perencanaan Keuangan Desa dan Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa, sedangkan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan serta menjadi variabel yang paling dominan. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,852 menunjukkan bahwa 85,2% variasi kinerja pemerintah desa dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa di Kecamatan Detusoko. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai upaya memperbaiki kinerja dan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: Perencanaan Keuangan Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Pemerintah Desa.

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa berperan sebagai elemen terdepan dalam pelaksanaan pembangunan nasional pada tingkat paling rendah. Peran tersebut sangat strategis dalam mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat desa. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil, Desa memiliki kewenangan dalam mengelola berbagai potensi dan sumber daya yang tersedia guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam menjalankan fungsi tersebut,

pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu aspek krusial yang harus diperhatikan secara serius. Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara baik dan tertib akan menjamin pemanfaatan sumber daya desa secara efektif dan efisien, sehingga tujuan pembangunan desa dapat diwujudkan secara optimal.

Pemerintahan desa sebagai pemerintahan terkecil di Indonesia memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan nasional. Desa merupakan tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan. Pengelolaan pemerintahan desa yang baik sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya, terutama pengelolaan keuangan desa yang tepat, transparan, dan akuntabel. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas demi tercapainya tujuan pembangunan desa.

Perencanaan keuangan desa merupakan proses awal yang sangat menentukan keberhasilan pengelolaan dana desa. Melalui perencanaan yang matang, pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran dengan tepat sasaran sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Perencanaan keuangan yang baik juga menjadi dasar dalam mengendalikan pengeluaran dan memastikan program-program pembangunan dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan. Namun, realitas dilapangan masih banyak dijumpai perencanaan keuangan desa yang belum optimal, baik dari segi penyusunan dokumen perencanaan maupun implementasinya. Keadaan ini memberikan dampak langsung terhadap berkurangnya efektivitas kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selain Perencanaan keuangan, aspek akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan pemerintahan desa. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban pemerintah desa dalam memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana serta pelaksanaan program pembangunan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait. Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah desa untuk bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengelola sumber daya desa kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (Bovens, 2007). Dengan akuntabilitas yang tinggi, pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya desa dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Akuntabilitas yang kurang baik dapat menimbulkan berbagai masalah seperti penyalahgunaan dana, korupsi dan lemahnya kontrol masyarakat terhadap pemerintah desa.

Transparansi merupakan pelengkap dari akuntabilitas yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program desa. Keterbukaan informasi ini sangat penting agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan dan evaluasi pembangunan desa. Transparansi memungkinkan

masyarakat desa memperoleh informasi yang memadai tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa sehingga mereka dapat melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah desa (Hood, 2006). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2020), ditemukan bahwa tingkat transparansi yang tinggi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan pengawasan yang lebih efektif. Namun demikian, masih terdapat desa-desa yang kurang mengoptimalkan transparansi, yang menyebabkan rendahnya pengawasan masyarakat dan potensi penyalahgunaan dana desa. Dengan transparansi yang baik, potensi konflik dan kecurigaan terhadap pemerintah desa dapat diminimalisasi, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat. Namun, dalam banyak kasus transparansi ditingkat desa masih kurang maksimal, yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.

Kinerja pemerintah desa menunjukkan tingkat keberhasilan dari berbagai aktivitas yang dijalankan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan desa. Kinerja yang baik dapat diartikan sebagai

kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, efisien serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pemerintah desa menjadi hal yang krusial untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan desa secara menyeluruh. Kinerja yang baik ditandai dengan pencapaian target pembangunan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan pengelolaan dana desa yang tepat sasaran (Robbins & Judge, 2013). Menurut penelitian Wahyudi dan Hasanah (2021), kinerja pemerintah desa sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan keuangan, tingkat akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji secara terpisah pengaruh perencanaan keuangan, akuntabilitas maupun transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun, sebagian besar penelitian tersebut fokus pada pemerintahan kabupaten atau kota sedangkan studi yang memfokuskan pada pemerintahan desa masih sangat terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian hanya menguji variabel secara terpisah tanpa mempertimbangkan interaksi dan pengaruh simultan antara perencanaan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi dalam

konteks pemerintahan desa. Hal ini menjadi gap penting yang perlu diisi, mengingat karakteristik pemerintahan desa yang unik, dan memiliki tantangan tersendiri dibanding tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Pemerintah desa biasanya memiliki sumber daya manusia yang terbatas, mekanisme pengelolaan keuangan yang lebih sederhana, dan tingkat partisipasi masyarakat yang beragam (Supriyadi & Amalia, 2019).

Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengkaji secara empiris pengaruh simultan perencanaan keuangan desa, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja pemerintah desa sebagai bentuk upaya memahami faktor-faktor kunci dalam peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang efektif. Penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan mengambil lokasi di Kecamatan Detusoko sebagai objek penelitian yang di harapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan pemerintahan desa di wilayah tersebut. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam guna memahami Pengaruh Perencanaan Keuangan Desa, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Detusoko.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Perencanaan Keuangan Desa (X_1), Akuntabilitas (X_2), dan Transparansi (X_3) terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Y) di Kecamatan Detusoko. Data diperoleh dari 63 responden aparatur pemerintah desa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert. Analisis data dilakukan menggunakan bantuan program SPSS melalui statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji instrumen yang meliputi uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh uji asumsi klasik telah terpenuhi, sehingga data dinyatakan berdistribusi normal serta bebas dari gejala multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh parsial dan uji F untuk mengetahui pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil dari analisis statistik deskriptif dijelaskan pada tabel 1 berikut :

Table 1. Deskripsi Statistik

Variabel	Deskriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perencanaan Keuangan Desa	63	46.00	60.00	56.0794	3.60690
Akuntabilitas	63	35.00	45.00	41.7460	2.66983
Transparansi	63	36.00	50.00	46.6190	3.37174
Kinerja Pemerintah Desa	63	55.00	75.00	69.9048	5.09495

Sumber: Data Primer Diolah 2026

Berdasarkan Tabel 1, variabel Perencanaan Keuangan Desa memiliki jumlah responden sebanyak 63 orang dengan nilai minimum sebesar 46,00 dan nilai maksimum sebesar 60,00. Nilai rata-rata (mean) yang diperoleh sebesar 56,0794 menunjukkan bahwa secara umum responden menilai perencanaan keuangan desa berada pada kategori baik. Standar deviasi sebesar 3,60690 mengindikasikan bahwa variasi data relatif kecil, sehingga jawaban responden cenderung homogen.

Variabel Akuntabilitas menunjukkan nilai minimum sebesar 35,00 dan nilai maksimum sebesar 45,00 dengan nilai mean sebesar 41,7460. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa dinilai cukup tinggi oleh responden. Nilai standar deviasi sebesar 2,66983 menunjukkan bahwa persebaran data cukup rendah, yang berarti persepsi

responden terhadap akuntabilitas relatif seragam.

Variabel Transparansi memiliki nilai minimum sebesar 36,00 dan nilai maksimum sebesar 50,00 dengan nilai rata-rata sebesar 46,6190. Nilai mean tersebut menunjukkan bahwa tingkat transparansi pemerintah desa dinilai tinggi oleh responden. Standar deviasi sebesar 3,37174 menunjukkan adanya variasi jawaban responden, namun masih berada dalam kategori wajar dan terkendali.

Variabel Kinerja Pemerintah Desa memiliki nilai minimum sebesar 55,00 dan nilai maksimum sebesar 75,00 dengan nilai mean sebesar 69,9048. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa di Kecamatan Detusoko dinilai baik oleh responden. Standar deviasi sebesar 5,09495 mengindikasikan adanya variasi penilaian kinerja, namun secara umum responden memiliki persepsi yang positif terhadap kinerja pemerintah desa.

Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi, dapat dituliskan sebagai berikut:

Table 1 Pengujian Regresi

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.076	4.023		.985
	X1	.306	.156	.217	.054
	X2	.067	.207	.035	.748
	X3	1.070	.143	.708	0.00

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi dalam peneitian ini yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + +b_3X_3 + e$$

$$Y = 0.076 - 0.306X_1 + 0.067X_2 + 1.070X_3 + e_1$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, konstanta sebesar 0,076 menunjukkan bahwa apabila variabel Perencanaan Keuangan Desa (X_1), Akuntabilitas (X_2), dan Transparansi (X_3) dianggap konstan atau bernilai nol, maka Kinerja Pemerintah Desa (Y) memiliki nilai sebesar 0,076. Koefisien regresi Perencanaan Keuangan Desa (X_1) sebesar 0,306 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel tersebut akan menurunkan Kinerja Pemerintah Desa sebesar 0,306 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien Akuntabilitas (X_2) sebesar 0,067 menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas akan meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa sebesar 0,067 satuan. Sementara itu, Transparansi (X_3) memiliki koefisien regresi sebesar 1,070 yang berarti setiap peningkatan satu satuan transparansi akan meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa sebesar 1,070 satuan, sehingga dapat

disimpulkan bahwa Transparansi memiliki pengaruh paling besar terhadap Kinerja Pemerintah Desa dibandingkan variabel lainnya dalam model regresi ini.

Koefisian Determinasi (R^2)

Berikut adalah hasil uji determinasi R^2 yang terdapat pada tabel berikut :

Table 3. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.927 ^a	.859	.852	1.963	1.918
a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas, Perencanaan Keuangan Desa					
b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Desa					

Berdasarkan tabel 3. Adjusted R Square bernilai 0.852 yang artinya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) sebesar 85,2%.

Uji Model (F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen.

Table 4. Uji F

ANOVA ^a						
1	Model	Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	1.382.012	4	460.671	119.514	.000b
	Residual	227.417	59	3.855		
	Total	1.609.429	63			

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 4, diperoleh nilai F hitung sebesar 119,514 dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$), yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan secara simultan. Hal ini berarti bahwa variabel perencanaan

keuangan desa, akuntabilitas, dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh simultan variabel independen terhadap kinerja pemerintah desa dapat diterima.

Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial (satu persatu) berpengaruh terhadap variabel dependen.

Table 5 Uji T

Model	Variabel	Standardized Coefficients	t	Sig.
1	(Constant)		.019	.985
	Perencanaan Keuangan Desa	.217	1.968	.054
	Akuntabilitas	.035	.323	.748
	Transparansi	.708	7.479	.000

Berdasarkan hasil Uji t pada Tabel 11, variabel Perencanaan Keuangan Desa memiliki nilai t hitung sebesar 1,968 dengan nilai signifikansi 0,054 ($> 0,05$) dan nilai standardized beta sebesar 0,217. Hasil ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga Perencanaan Keuangan Desa tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja Pemerintah Desa. Meskipun demikian, nilai koefisien beta yang positif mengindikasikan adanya arah

pengaruh positif, namun pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik.

Variabel Akuntabilitas menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,323 dengan nilai signifikansi 0,748 ($> 0,05$) serta nilai standardized beta sebesar 0,035. Berdasarkan hasil tersebut, H_0 diterima dan H_2 ditolak, yang berarti bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja Pemerintah Desa. Nilai beta yang sangat kecil menunjukkan bahwa kontribusi variabel Akuntabilitas dalam menjelaskan variasi kinerja pemerintah desa relatif rendah.

Variabel Transparansi memiliki nilai t hitung sebesar 7,479 dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$) dan nilai standardized beta sebesar 0,708. Hasil ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima, sehingga Transparansi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kinerja Pemerintah Desa. Selain itu, nilai beta yang paling besar dibandingkan variabel lain menunjukkan bahwa Transparansi merupakan variabel paling dominan dalam memengaruhi kinerja pemerintah desa dalam model penelitian ini.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Perencanaan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Berdasarkan uji t , Perencanaan Keuangan Desa memiliki nilai t hitung = 1,968 dengan signifikansi 0,054, sehingga tidak signifikan secara parsial karena nilai Sig. lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perencanaan keuangan desa cenderung berpengaruh positif terhadap variabel dependen, pengaruhnya belum cukup kuat untuk dikatakan nyata secara statistik. Dari sisi multikolinearitas, nilai Tolerance = 0,197 dan VIF = 5,065, yang masih berada di bawah ambang batas VIF < 10 dan tolerance > 0,10. Ini berarti Perencanaan Keuangan Desa tidak mengalami masalah multikolinearitas dengan variabel lain sehingga variabel ini dapat dipertahankan dalam model regresi. Namun, peneliti perlu mempertimbangkan perbaikan indikator atau penambahan sampel agar pengaruhnya menjadi signifikan.

Dengan hasil ini, pemerintah desa diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas perencanaan keuangan dengan melibatkan masyarakat, memperkuat kapasitas aparatur desa dalam penyusunan anggaran, serta meningkatkan koordinasi antarperangkat desa dalam proses perencanaan. Peningkatan kualitas perencanaan keuangan secara berkelanjutan akan berdampak positif pada pencapaian target pembangunan desa serta pada peningkatan kepercayaan masyarakat

terhadap kinerja pemerintah desa secara keseluruhan.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Nilai uji t untuk Akuntabilitas adalah t hitung = 0,323 dengan signifikansi 0,748, sehingga tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa variasi pada akuntabilitas dalam penelitian ini tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap perubahan variabel dependen. Meskipun demikian, nilai Tolerance = 0,203 dan VIF = 4,917 menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak mengalami multikolinearitas dengan variabel lainnya karena VIF masih jauh di bawah 10. Dengan demikian, rendahnya pengaruh Akuntabilitas bukan disebabkan oleh multikolinearitas, melainkan kemungkinan disebabkan oleh faktor instrumen penelitian, pemahaman responden, atau konteks yang tidak mendukung variabel ini. Peneliti bisa mempertimbangkan revisi indikator atau memperluas sampel agar hasilnya lebih representatif.

Hasil penelitian ini memberikan makna bahwa akuntabilitas berperan penting dalam mendorong peningkatan kinerja pemerintah desa. Akuntabilitas adalah salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang menuntut pemerintah

desa untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan, kebijakan, serta penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Ketika akuntabilitas diterapkan dengan baik, pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Transparansi menunjukkan hasil yang sangat signifikan dengan t hitung = 7,479 dan $\text{Sig.} = 0,000$, yang berarti Transparansi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Nilai Beta = 0,708 juga menunjukkan bahwa Transparansi merupakan variabel paling dominan dalam model regresi. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan transparansi dalam pengelolaan desa secara nyata akan meningkatkan variabel dependen (misalnya kinerja, partisipasi masyarakat, atau akuntabilitas). Dari sisi multikolinearitas, nilai Tolerance = 0,267 dan VIF = 3,740 masih berada pada batas aman ($\text{VIF} < 10$), sehingga pengaruh Transparansi dapat dianggap valid dan tidak dipengaruhi oleh korelasi tinggi antar variabel. Dengan demikian, Transparansi menjadi faktor kunci yang perlu diperkuat dalam upaya meningkatkan kinerja desa.

Transparansi dan akuntabilitas berdasarkan hasil pengujian berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Desa. Transparansi adalah kebebasan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan kepentingan public yang secara langsung dapat diperoleh pihak-pihak yang berkepentingan. Penerapan asas transparansi mencakup kemudahan mengakses informasi keuangan yang dibutuhkan Masyarakat, dan laporan tersebut dipahami. Kemudahan mengakses informasi terwujud apabila dipublikasikan secara terbuka melalui media masa atau website.

Dengan demikian transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerinah desa, berarti bahwa pelaksanaan tanggung jawab pemerintah desa diungkapkan secara jujur dan terbuka yang memungkinkan semua pihak yang berkepentingan terutama Masyarakat dapat mengetahui sekaligus menilai perkembangan kinerja pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan konsep teori yang dikemukakan Krina (2003) yang menyatakan bahwa transparansi pertanggungjawaban aparat atas pelaksanaan wewenang atau pelaksanaan lingkup tanggung jawab secara jujur dan terbuka sehingga Masyarakat dapat memperoleh informasi yang mudah dipahami dan diakses pendayagunaan sumber daya.

Selain itu, tingginya nilai t-hitung mengindikasikan bahwa transparansi memiliki posisi dominan dalam menjelaskan variasi kinerja pemerintah desa dalam model regresi. Hal ini berarti bahwa meskipun variabel lain seperti perencanaan keuangan desa dan akuntabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan, namun transparansi memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kinerja pemerintah desa. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa transparansi memiliki efek signifikan terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Keuangan Desa dan Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja Pemerintah Desa, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,054 dan 0,748 ($> 0,05$), meskipun Perencanaan Keuangan Desa memiliki arah pengaruh positif. Sebaliknya, Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Desa dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$) serta memiliki nilai Standardized Beta terbesar (0,708),

yang menunjukkan bahwa transparansi merupakan variabel paling dominan dalam model penelitian. Dengan demikian, peningkatan keterbukaan informasi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terbukti berperan penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa.

Saran

Penelitian ini memberikan beberapa saran dan memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Bagi pemerintah desa, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan keuangan melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan perencanaan partisipatif, serta penyempurnaan sistem pengelolaan anggaran, memperkuat akuntabilitas melalui sistem pelaporan dan pengawasan internal yang lebih baik, serta meningkatkan transparansi dengan memperluas akses informasi publik melalui berbagai media agar partisipasi dan kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek dan lokasi penelitian serta mempertimbangkan penggunaan metode penelitian kualitatif atau mixed methods guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Adapun keterbatasan penelitian ini meliputi jumlah responden yang terbatas, penggunaan

kuesioner berbasis persepsi yang berpotensi menimbulkan bias subjektivitas, fokus pada tiga variabel independen saja, serta penggunaan pendekatan kuantitatif yang belum menggali data secara mendalam melalui wawancara atau observasi lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, A., Abdillah, L. A., & Andryani, R. (2015). E-monitoring program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) pada Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Muba. *Jurnal Sistem Informasi*, 7(2), 45–55.
- Ahyaruddin, M., & Ramadanis. (2025). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Akuntansi Publik*, 10(1), 1–12.
- Amalia, S. (2023). Analisis pengaruh Siskeudes, kompetensi aparatur, dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 98–110.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ende. (2023). *Kecamatan Detusoko dalam angka 2023*. Ende: BPS Kabupaten Ende.
- Baktiani, D. (2021). Evaluasi transparansi dan akuntabilitas implementasi pengelolaan keuangan desa (Studi pada Pemerintah Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul). *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 6(1), 23–34.
- Bappenas. (2015). *Pedoman perencanaan pembangunan desa*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., & Reutzel, C. R. (2011). Signaling theory: A review and assessment. *Journal of Management*, 37(1), 39–67.
- Data Primer. (2026). *Hasil pengolahan kuesioner Perencanaan Keuangan Desa, Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Detusoko*. Pengolahan oleh Peneliti.
- Desa Saga. (2025). *Profil Desa dan struktur organisasi pemerintahan desa Saga*. Kecamatan Detusoko: Pemerintah Desa Saga.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. *Academy of Management Review*, 20(1), 65–91.
- Ferarrow, N., & Suprihanto, J. (2017). Evaluasi transparansi dan akuntabilitas implementasi tahap

- pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 4(2), 101–115.
- Fitriani, R. D., Suprihati, S., & Dewi, M. W. (2025). Analisis pengaruh efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah desa terhadap pengelolaan APBDes. *Jurnal Keuangan Daerah*, 9(1), 44–58.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston: Pitman Publishing.
- Friedmann, J. (1987). *Planning in the public domain: From knowledge to action*. Princeton: Princeton University Press.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hadjrah. (2019). Transparansi dan kinerja pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 112–125.
- Handayani, R. (2020). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah desa di Kabupaten Bantul. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(1), 67–79.
- Haryanto. (2020). Perencanaan pembangunan berbasis data dalam pemerintahan desa. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Daerah*, 8(2), 101–115.
- Herlianto. (2017). *Manajemen pembangunan desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, R., & Susilo, D. (2018). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dan implikasinya terhadap kinerja pemerintah desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 4(1), 55–68.
- Hidayat, T. (2022). Pengaruh Siskeudes, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah desa. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 7(2), 88–102.
- Hidayatulloh, F. (2023). Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 55–68.
- Hood, C. (2006). Transparency in historical perspective. *British Journal of Politics and International Relations*, 8(1), 3–23.
- Jamaludin. (2015). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 89–99.
- Krina, L. L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance, Badan Perencanaan

- Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Kurniawan, D. (2016). Pengaruh faktor sosial budaya terhadap partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 9(1), 33–45.
- Kusnadi. (2012). *Akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa*. Bandung: Alfabeta.
- Lestari, I. (2021). Pengaruh perencanaan dan pelaksanaan anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 6(1), 33–45.
- Mahmudi. (2015). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 3(2), 101–112.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nasution, S. (2014). *Manajemen pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2025). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Keuangan Publik*, 10(1), 77–90.
- Nugroho, R. (2019). *Public policy: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, dan manajemen politik kebijakan publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurjanna, Permatasari, I., & Hasmi, N. (2025). Analisis akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 11(1), 15–28.
- Padilah, Rahayu, S., & Yudi. (2025). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, kejelasan sasaran anggaran, dan komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 1–14.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende. (2020). *Peraturan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa*. Ende: Pemerintah Daerah Kabupaten Ende.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan

- Keuangan Desa.
- Permendagri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Permendagri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendesa PDTT Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Pratama, A. (2020). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 5(2), 85–98.
- Putra, A. (2021). Pengaruh perencanaan, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja pemerintah desa. *Jurnal Keuangan Daerah*, 4(1), 45–60.
- Putra, A., & Sari, M. (2018). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan keuangan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 90–102.
- Putra, R. (2020). Pengaruh implementasi Siskeudes dan kompetensi aparat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 60–73.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Organizational behavior* (15th ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Rohdewohld, R. (1995). *Public administration and accountability*. New York: Oxford University Press.
- Rohman, A. (2017). *Perencanaan dan penganggaran daerah*. Bandung: Alfabeta.
- RPJMD Kabupaten Ende. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende 2021–2026*. Ende: Bappeda Kabupaten Ende.
- Sahrullah, Istiqamah, Q., & Wahyuni, A. R. (2020). Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah desa. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 4(1), 21–34.
- Santoso, S. (2016). *Statistik untuk Penelitian* (Edisi Revisi). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Santoso. (2018). Akuntabilitas dan kinerja pemerintah desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 89–102.
- Setiawan. (2018). Transparansi keuangan desa berbasis teknologi informasi. *Jurnal Administrasi Negara*, 7(1), 33–48.
- Siagian, S. P. (2010). *Manajemen strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simamora, H. (2004). *Manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.

- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, & Amalia, R. (2019). Tata kelola dan kinerja pemerintahan desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 55–70.
- Supriyadi, & Amalia, R. (2019). Tata kelola keuangan desa dan tantangan peningkatan kinerja pemerintah desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 45–58.
- Supriyadi, & Amalia, R. (2019). Tata kelola keuangan desa dan tantangan peningkatan kinerja pemerintah desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 45–58.
- Suryadi. (2015). *Perencanaan pembangunan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Susanr. (2017). Kepemimpinan desa dan pengaruhnya terhadap perencanaan pembangunan. *Jurnal Kepemimpinan Publik*, 5(1), 21–34.
- Syamsuddin, A. (2022). Pengaruh tata kelola keuangan dan pengawasan terhadap kinerja aparatur desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 70–84.
- Terry, G. R. (2005). *Principles of management*. Homewood: Richard D. Irwin.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Wahyudi, A., & Hasanah, S. (2021). Pengaruh perencanaan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja pemerintah desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 6(1), 23–37.
- Wahyudi. (2017). Kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(3), 201–214.
- Walukow, M., Kalangi, L., & Warongan, J. (2017). Analisis perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 8(2), 112–125.
- World Bank. (2004). *World development report: Making services work for poor people*. Washington, DC: World Bank.